
**IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DI
KABUPATEN BANYUMAS**

Maulida Dewi Pangestika
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
Maulidamp17@gmail.com

***Abstract.** Identification of leading sectors in banyumas regency is one of the means to develop economy according to its potential. This is opportunity for the region to employ natural resources. However, there is a decentralization policy haven't been able to improve economy. Its indicated by the high regional inequality even though the source of financing has been fully managed by the local government. This study purpose to determine the superior sector of banyumas regency. The study uses secondary data sources from the central statistics agency in the 2018-2022. The analysis used includes location quotient (LQ), shift share (SS), and Tipology Klassen. The results showed that Banyumas regency had a shift in leading sectors with prime categories sectors including industrial processing, construction, information and communication. While, potential conditions including retail trade, agriculture.*

Keyword: *leading sector, gross domestic bruto, fiscal decentralization*

***Abstrak.** Identifikasi sektor unggulan pada kabupaten banyumas merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut menjadi peluang bagi wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Namun adanya kebijakan desentralisasi fiskal ternyata belum mampu memaksimalkan perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya ketimpangan wilayah walaupun sumber pendanaan sepenuhnya telah dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan kabupaten banyumas. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari badan pusat statistik pada rentan waktu tahun 2018-2022. Analisis yang digunakan antara lain Location Quotient, Shift Share, dan tipologi klassen. Hasil penelitian didapat bahwa kabupaten banyumas memiliki pergeseran sektor unggulan dengan kategori prima atau perekonomian cepat antara lain industri pengolahan, konstruksi, dan informasi dan komunikasi, sedangkan kondisi potensial yaitu perdagangan besar dan eceran serta pertanian, peternakan, dan perikanan.*

Kata kunci: *sektor unggulan, produk domestik regional bruto, desentralisasi fiskal*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan salah satu keputusan pemerintah dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur sistem pemerintahan sesuai potensi yang dimiliki. Kebijakan ini penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi suatu wilayah agar bisa mempercepat perekonomian dengan potensi yang dimiliki. Adapun perbedaan yang potensi dapat mendorong setiap daerah dalam melakukan spesialisasi keunggulan komparatif hingga berdampak pada ekonomi wilayah (Sarwo,2019).

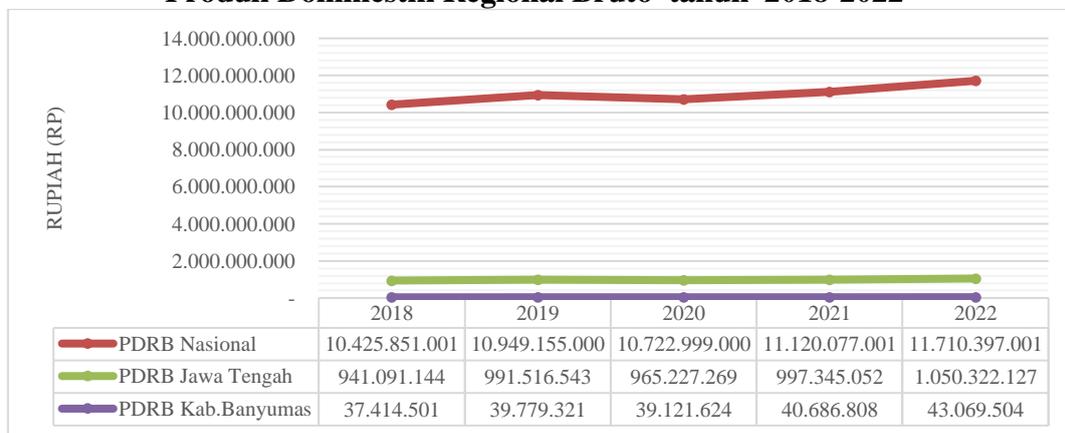
Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah yang memilki peran dalam mengelola keuangan secara mandiri sehingga potensi harus dimaksimalkan serta perencanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi wilayah otonom baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten kota (Kharisma 2013). Pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah termasuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan dan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adanya desentralisasi mempengaruhi kebijakan pemerintah yang

terdiri dari pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan pada pemerintah daerah (Hastuti 2018). Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian menjadikan suatu daerah memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Menurut jurnal Khusaini (2015) daya saing daerah menjadi indikator utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Martinez-Vazquez, Lago-Peñas, and Sacchi (2017) menjelaskan bahwa adanya desentralisasi menjadi sarana dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien.

Kabupaten Banyumas memberikan sumbangan perekonomian besar di provinsi jawa tengah. Berdasarkan data pada badan pusat statistik produk domestik regional bruto kota semarang mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018-2022. Namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -1,65%. Sebagai kabupaten provinsi jawa tengah Kabupaten Banyumas memiliki sektor yang menjadi penopang ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan nilai perekonomian berdasarkan kurun waktu tertentu. Berikut data PDRB nasional, provinsi dan kabupaten banyumas sebagai berikut:

Gambar 1.
Produk Domestik Regional Bruto tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data diatas dijelaskan dari tahun bruto nasional. Pada tahun 2022 PDRB 2018-2022 dimana kebijakan desentralisasi Nasional sebesar Rp 11.710.397.001 fiskal sudah diterapkan. Kondisi produk sedangkan PDRB Jawa tengah sebesar Rp domestik regional bruto merupakan 1.050.322.127 Kab. Banyumas sebesar Rp gambaran perekonomian suatu wilayah. 43.069.504. dalam menentukan objek Kabupaten Banyumas merupakan Kabupaten penelitian tidak hanya memperhatikan PDRB dengan penerimaan perekonomian yang tetapi juga ketimpangan wilayah yang cukup besar. Meskipun hal tersebut masih disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Indeks wiliams (IW) Perkaresidenan di Jawa Tengah tahun 2018-2022

Karesidenan	2018	2019	2020	2021	2022	IW
Banyumas	0,319	0,319	0,333	0,334	0,284	0,318
Kudus	0,107	0,109	0,102	0,105	0,113	0,107
Surakarta	0,074	0,073	0,072	0,071	0,030	0,064
Pati	0,237	0,236	0,247	0,247	0,197	0,233
Semarang	0,089	0,088	0,199	0,196	0,375	0,189
Pekalongan	0,175	0,175	0,047	0,047	0,000	0,089

Sumber: Badan Pusat Statistik,2023

Kondisi perekonomian yang fluktuatif antar daerah setelah adanya desentralisasi fiskal diduga sejalan dengan peningkatan ketimpangan yang cukup besar antar kabupaten kota. Wilayah karesidenan provinsi jawa tengah yang terdiri dari kabupaten banyumas, kabupaten kudus, kota surakarta, kabupaten pati, kota

semarang dan kota pekalongan memiliki ketimpangan yang ditunjukkan dalam tabel 1. Hasil perhitungan indeks wiliams menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan ekonomi maka angka yang didapat semakin mendekati angka 1. Kabupaten Banyumas memiliki tingkat ketimpangan tertinggi sebesar 0,318

kemudian disusul oleh kabupaten pati 0,233 dan kota semarang sebesar 0,189.

Hasil tersebut menjelaskan desentralisasi yang belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan masih adanya kesenjangan antar daerah walaupun sumber pendanaan telah dikelola sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan statistik sektor unggulan berdasarkan lapangan usaha sehingga dapat diketahui sektor mana yang potensial untuk dikembangkan dan meningkatkan daya saing wilayah tersebut (Pujiati,2008). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan ekonomi berdasarkan lapangan usaha dalam meningkatkan pengelolaan perekonomian pada kabupaten banyumas.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Desentralisasi Fiskal

Penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah merupakan kebijakan yang potensial dalam meningkatkan potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing. Proses pemberdayaan yang memiliki pengaruh signifikan dalam memacu intensitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah dapat menjadi solusi yang lebih inovatif dalam menghadapi persoalan daerah. Menurut George R. Terry dalam buku (Sulila 2015) menjelaskan kelebihan dari desentralisasi fiskal sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang dilimpahkan ke daerah memiliki ukuran wewenang serta meminimalisir beban manajemen teratas

- 2) Meningkatkan kesadaran dan keserasian antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga memiliki koordinasi yang baik
- 3) Meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan
- 4) Memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan maksimal sesuai wilayah masing-masing.

Sedangkan kelemahan adanya desentralisasi fiskal menurut idris dalam karya ilmiah (Wahyuningrum,2022) antara lain:

- 1) Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga membuat struktur pemerintah menjadi semakin kompleks
- 2) Adanya gangguan dari kesetaraan dan kepentingan antar daerah
- 3) Menimbulkan sifat etnosentrisme
- 4) Membutuhkan anggaran dana yang lebih besar dan susah koordinasi dengan pemerintah pusat

Desentralisasi diperlukan untuk menumbuhkan aspirasi daerah yang sesuai dengan potensi lokal. Proses pemberdayaan memiliki hubungan signifikan dan dapat memacu partisipasi atau inisiatif daerah dalam mengatasi permasalahan. pengembalian keputusan pada bidang fiskal meliputi (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expanditure assignment). Selain itu, desentralisasi fiskal juga dikaitkan dengan tugas atau fungsi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*public goods/public services*).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi definisi dari proses yang menyebabkan pendapatan

perkapita penduduk suatu masyarakat atau negara meningkat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari berbagai faktor antara lain: 1) sumber daya alam, 2) sumber daya insani (jumlah penduduk), 3) stok modal yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perkembangan teori ekonomi pembangunan antara lain:

1) Teori ekonomi klasik

Pada ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa keadaan teknologi dari sumber daya alam tetap konstan seiring dengan penambahan penduduk. Pada teori ini menjelaskan mengenai akumulasi modal, penambahan penduduk yang dianalisis dalam jangka panjang.

2) Teori ekonomi neo-klasik

Faktor fundamental yang diperlukan dalam pembangunan. Adapun jika masyarakat tidak menabung maka peluang peningkatan teknologi dalam menaikkan pendapatan perkapita melalui pembentukan modal yang tidak terlaksana. Aliran neoklasik memanfaatkan perdagangan internasional sebagai upaya pendapatan nasional rill.

3) Teori harrod domar

Konsep dari teori harrod domar yang menjelaskan pendapatan nasional dengan pembentukan modal. Adapun marginal propensity to save dan incremental capital output ratio (ICOR) dalam ekonomi. model ini menekankan pada investasi yang dapat meningkatkan ekonomi suatu wilayah.

4) Aliran keynes

Faktor utama dari aliran keynes

merupakan ekonomi makro, tenaga kerja, dan pendapatan nasional. Keynes memperhatikan pembangunan melalui pembentukan modal dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar.

Sektor unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor ini penting dalam menopang pembangunan ekonomi suatu wilayah yang tidak hanya mengacu pada kondisi demografis melainkan sektor yang mampu menyebar berbagai saluran ekonomi sehingga dapat menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Adapun ciri-ciri sektor unggulan dijelaskan sebagai berikut Soebagiyo dan Hascaryo (2015):

- 1) Sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi
- 2) Sektor yang memiliki angka penyebaran yang relatif besar
- 3) Sektor yang memiliki keterkaitan antara sektor lain
- 4) Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi Penelitian berada di Kabupaten Banyumas. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi JawaTengah dan Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: produk domestik regional bruto Kabupaten, Jumlah penduduk, Produk domestik regional bruto Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan

selama rentan tahun 2018-2022. Dalam menganalisis pemetaan potensi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan informasi berupa: 1) informasi mengenai sektor unggulan di Kabupaten Banyumas, 2) upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Analisis Location Quotient (LQ)

Metode ini digunakan untuk menilai potensi sektor ekonomi pada level regional (kecamatan/provinsi) dengan nasional. Adapun pada analisis ini menggunakan data antar waktu sehingga dapat diketahui trend dalam menentukan sektor unggulan, andalan, dan kurang prospektif pada suatu daerah.

Perhitungan dari LQ mengacu pada rumus pada jurnal Hidayat and Darwin (2017):

$$LQ = \frac{\frac{PDRB_{mi}}{\sum PDRB_m}}{\frac{PDRB_{sbi}}{\sum PDRB_{sb}}}$$

Dimana:

- $PDRB_{mi}$: PDRB sektor i pada kab.
- $\sum PDRB_m$: Total PDRB pada kabupaten
- $PDRB_{sbi}$: PDRB sektor i pada provinsi
- $\sum PDRB_{sb}$: Total PDRB sektor i pada provinsi

Hasil dari perhitungan LQ diklasifikasikan menjadi 2 yaitu apabila nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis atau potensial. Sedangkan apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis atau kurang potensial.

2) Analisis Shift Share

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan laju pertumbuhan pada

sektor-sektor dengan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan pada lapangan usaha. Apabila hasil positif maka suatu sektor memiliki keunggulan yang kompetitif. Perhitungan dari analisis shift share dijelaskan sebagai berikut:

$$Dj = Eijt - \left[\left(\frac{Eit}{Eio} \right) \times Eijo \right]$$

Dimana:

- Dj : pergeseran nilai
- $Eijt$: jumlah aktivitas produksi pada awal tahun
- Eit : total produksi pada awal tahun
- Eio : total produksi pada akhir tahun
- $Eijo$: proporsional nilai
- Ds : diferensial nilai

Adapun klasifikasi pengelompokan analisis shift share

Tabel 2.
Pengelompokan Analisis Shift Share

DS/PS	DS>0	DS<0
PS>0	Kuadran I (winner)	Kuadran II (mixer winner)
PS<0	Kuadran III (Lossers)	Kudaran IV (mixed lossers)

Sumber: Tallo (2018)

3) Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi klasen merupakan metode dalam mengetahui perekonomian berdasarkan pada sub sektor atau komoditas unggulan suatu daerah. Pada analisis akan diperoleh informasi dengan membandingkan kontribusi dengan pertumbuhan subsektor sehingga menghasilkan 4 kategori yang dijelaskan sebagai berikut Patiung and Wisnujati (2020):

- a. Tipologi I: area dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang cukup tinggi (*high growth and income*). Area ini

- disebut sebagai area cepat dan tumbuh atau prima
- b. Tipologi II : area dengan kategori maju tapi tertekan (*high income but low growth*) atau potensial
 - c. Tipologi III : area yang dikategorikan berkembang dengan cepat (*high growth but low income*) atau berkembang
 - d. Tipologi IV : area yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) atau tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

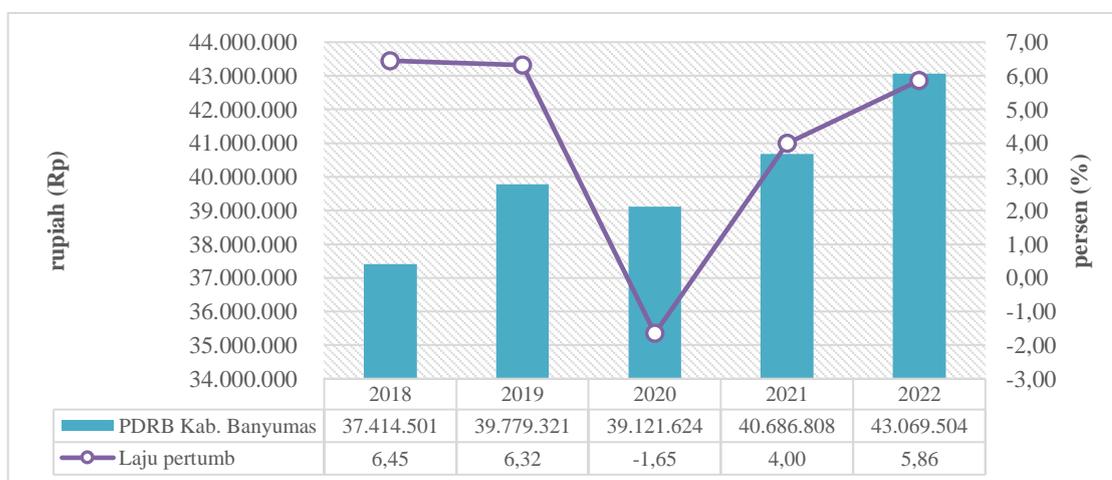
Gambaran umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak pada 7° 15' 05" - 7° 37' 10" lintang selatan dan antara 108° 39' 17" - 109° 27' 15" Bujur Timur. Wilayah ini merupakan salah satu kabupaten provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.327,59 km² atau 4,04 persen dari luas provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas memiliki 27

kecamatan dan 331 desa yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Adapun jumlah penduduk di kabupaten Banyumas tahun 2022 sebanyak 1.806.013 jiwa dengan 908.981 jiwa laki-laki dan 897.032 jiwa perempuan. Adapun tingkat kemiskinan dengan presentase tahun 2022 menurun menjadi 12,84% dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 13,66%. Kontribusi sektor pertanian ini didukung oleh tiga subsektor antarlain sub pertanian, sub peternakan, dan sub sektor perikanan. Komoditi pertanian yang dihasilkan seperti sawah, jagung, ketela, ubi jalar, dsb. Adapun komoditi ternak unggulan seperti sapi, kerbau, kambing (Khasanah, 2018).

Perekonomian kabupaten Banyumas semakin baik setelah krisis ekonomi tahun 2020 yang mengalami -1,65 persen akibat covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa PDRB Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022 namun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat krisis ekonomi global yang membawa dampak kabupaten banyumas. Perekonomian kabupaten banyumas seiring membaik setelah kasus covid 19 dengan produk domestik regional kabupaten banyumas meningkat sebesar Rp 40.686. 808,- dan laju pertumbuhan ekonomi 4 %. Peningkatan juga terjadi di tahun 2022 dengan PDRB sebesar Rp 43.069.504,- dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 %.

Hasil Analisis penelitian

Identifikasi analisis potensi ekonomi daerah dengan menggunakan tiga metode diantaranya Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), dan Tipologi Klassen. Adapun analisis LQ digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi pada wilayah regional, provinsi, dan nasional. Hasil analisis LQ mencakup basis dan non basis. Adapun analisis shift share dengan pendekatan klasik menganalisis nilai Nij, Mij, Cij,dan Dij. Nilai Nij positif yang

berarti pertumbuhan ekonomi sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya Mij menunjukan sektor yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, Cij bernilai positif maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi dan memiliki kinerja kompetitif.

Analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui pola dan struktur daerah dengan mengelompokkan sektor berdasarkan pada pertumbuhan, kontribusi, dan kategori. Hasil dari tipologi klasen dibagi menjadi empat diantaranya prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Berikut hasil analisis dari LQ, Shift Share, dan tipologi klasen sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil analisis LQ,SS, dan Tipologi Klasen Kabupaten Bayumas

Sektor	LQ	Shift Share				Tipologi Klaseen
		Nij	Mij	Cij	Dij	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Non Basic	523961,0983	-180.555,59	-122.671	220.734,53	Potensial
Pertambangan dan Penggalian	Basic	215238,0122	-207.530,68	109.751	117.458,70	Terbelakang
Industri Pengolahan	Non Basic	983981,3895	-351.698,08	820.167	1.452.450,73	Prima
Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basic	4638,666008	2.583,79	585	7.807,40	Berkembang

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Basic	3841,947847	856,71	1.182	5.880,90	Berkembang
Konstruksi	Basic	576132,3473	-58.344,81	15.916	533.703,60	Prima
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Basic	716148,5296	55.855,98	151.240	923.244,59	Potensial
Transportasi dan Pergudangan	Basic	168112,2248	282.229,23	103.189	553.530,46	Berkembang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basic	154926,9066	170.345,15	-17.007	308.265,49	Berkembang
Informasi dan Komunikasi	Basic	286081,3505	707.691,56	-100.330	893.443,07	Prima
Jasa Keuangan dan Asuransi	Basic	129308,7618	-39.992,90	-1.613	87.702,47	Terbelakang
Real Estate	Basic	107873,1536	12.734,79	5.764	126.371,99	Berkembang
Jasa Perusahaan	Non Basic	13004,25023	712,86	1.721	15.438,36	Berkembang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Basic	126116,6033	-91.132,32	4.057	39.041,55	Terbelakang
Jasa Pendidikan	Basic	207928,2481	-44.875,08	14.185	177.237,94	Berkembang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Basic	42746,31616	25.700,92	9.363	77.810,40	Berkembang
Jasa lainnya	Basic	82602,99354	7.852,35	24.426	114.881,62	Berkembang

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan pada hasil olah data penelitian dari analisis Locatoin Quentient (LQ) dari 11 lapangan usaha dari tahun 2018-2022 dimana kabupaten banyumas dengan kategori non basic diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan jasa perusahaan. Artinya sektor tersebut tidak berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten banyumas. Sedangkan kategori basic antara lain pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, administrasi pemerintahan, jasa pendudukan,

kesehatan, dan lainnya.

Hasil analisis shift share kabupaten banyumas dengan Nij (regional share) memiliki nilai positif, artinya semua sektor tersebut memiliki pengaruh ekonomi pada kabupaten banyumas. Adapun Mij (pergeseran proporsional) memiliki nilai negatif pada beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, administrasi dan jasa pendidikan. Hasil Mij menggambarkan bahwa sektor tersebut dinilai cukup lambat dalam mempengaruhi perekonomian. Sedangkan Cij merupakan sektor dengan keunggulan kompetitif. Nilai pergeseran bersih (Dij) kabupaten

banyumas pada semua sektor memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa perekonomian regional kabupaten banyumas mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah setiap tahunnya. Nilai pertumbuhan tertinggi dari hasil shift share yaitu sektor industri pengolahan, kemudian perdagangan besar dan eceran serta sektor informasi dan komunikasi.

Analisis tipologi klasen yang digunakan dalam klasifikasi perekonomian di kabupaten banyumas yang dikategorikan menjadi menjadi 3 diantaranya:

1. Prima : industri pengolahan, konstruksi, dan informasi serta komunikasi.
2. Potensial : pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil.
3. Berkembang : pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan sosial; dan jasa lainnya.
4. Terbelakang : pertambangan dan penggalan; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan lokasi penelitian. Hal ini karena penelitian hanya menggunakan data sekunder sehingga

tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai kondisi lapangan yang terbaru. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah kabupaten banyumas karena tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi dari beberapa kabupaten atau kota karesidenan provinsi jawa tengah. Penelitian ini menggunakan data hingga tahun 2022 karna keterbatasan data di tahun 2023. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan lebih hasil analisis kemudian diikuti oleh kondisi lapangan seperti apa sehingga bisa dilihat apakah terdapat perbedaan dari data sekunder dan primer.

SIMPULAN

Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang memiliki sektor unggulan pertanian, peternakan dan perikanan. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi geografi dan demografi dimana luas lahan sawah di kabupaten banyumas masih tinggi. Sejalan dengan perkembangan wilayah setiap tahunnya dimana berdasarkan hasil olah data didapat bahwa terdapat pergeseran sektor unggulan di kabupaten banyumas menjadi industri pengolahan, konstruksi, dan informasi dan komunikasi. Hal tersebut karena kondisi iklim yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap kualitas komoditas pertanian. selain itu perkembangan teknologi juga mempengaruhi adanya pergeseran sektor unggulan wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, Proborini. 2018. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1(1):784–99.
- Hidayat, Muhammad, And Ranti Darwin. 2017. "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti." *Berkala Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 12(2):156–67.
- Kharisma, Bayu. 2013. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 14(2):101–19.
- Khasanah, Nur. 2018. "Komoditas Tanaman Pangan Dan Ternak Unggulan Commodities Of Crops And Leading Livestock." 20(2):74–78.
- Khusaini, Moh. 2015. "A Shift-Share Analysis On Regional Competitiveness - A Case Of Banyuwangi District, East Java, Indonesia." *Procedia - Social And Behavioral Sciences* 211:738–44. Doi: 10.1016/J.Sbspro.2015.11.097.
- Martinez-Vazquez, Jorge, Santiago Lago-Peñas, And Agnese Sacchi. 2017. "The Impact Of Fiscal Decentralization: A Survey." *Journal Of Economic Surveys* 31(4):1095–1129. Doi: 10.1111/Joes.12182.
- Patiung, Markus, And Nugrahini Wisnujati. 2020. "Analysis Of Sustainability Of Economic Sector In Probolinggo District East Java Province – Indonesia." *Agricultural Social Economic Journal* 20(4):277–84. Doi: 10.21776/Ub.Agrise.2020.20.4.2.
- Pujiati, Amin. 2008. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13(2):61–70.
- Sarwo, Agus, Edy Sudrajat, Hendrianto Sundaro, And Jurnal Riptek. 2019. "Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah." *Jurnal Riptek* 13(1):29–38.
- Soebagiyo, Daryono, And Arifin Sri Hascaryo. 2015. "Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah." *University Research Colloquium* (Issn 2407-9189):138–51.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Tallo, Amandus Jong, Santi Palupi Arianti, Fitri Abdillah, Asep Syaiful Bahri, Sani Heryanto, Ferdinand Fassa, Maria Prihandrijanti, And Boyke Janus Anshory. 2018. "Typology Analysis And Leading Sector Of East Nusa Tenggara Province In 2017." *Journal Of Physics: Conference Series* 1114(1).
- Wahyuningrum, Dinar. 2022. "Implikasi Desentralisasi Fiskal Pada Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah: Sebuah Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah."